



**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
UPT MEDAN UTARA**

**SKRIPSI**

Dijjukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**DESTY RINIKA**  
NPM 1515100398

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DESTY RINIKA  
NPM : 1515100398  
PROGRAM STUDI : SI ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH UPT MEDAN UTARA

MEDAN, OKTOBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI

( Junawan, S.E., M.Si )

DEKAN



( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum )

PEMBIMBING I

( Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si )

PEMBIMBING II

( Rusyda Nazirah Yunus, S.S., M.Si )



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

**Persetujuan Ujian**

NAMA : DESTY RINIKA  
NPM : 1515100398  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 ( STRATA SATU )  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH UPT MEDAN UTARA

KETUA



( Juna Ayo, S.E., M.Si )

ANGGOTA I

( Rasyda Nazirah Yumas, S.S., M.Si )

MEDAN, OKTOBER 2019

ANGGOTA II

( Fitri Yanti Panggabean, S.E., M.Si )

ANGGOTA III

( Vina Arnita, S.E., M.Si )

ANGGOTA IV

( Hernawaty, S.E., MM )



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desty Rinika  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 September 1997  
NPM : 1515100398  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Jl. Cemara Gg. Lampu No.7a Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019  
Hormat Saya



(DESTY RINIKA)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESTY RINIKA  
NPM : 1515100398  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH UPT MEDAN  
UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Oktober 2019

( DESTY RINIKA )



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DESTY RINIKA  
 Tempat/Tgl. Lahir : medan / 13 September 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100398  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3,36

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara	<input type="checkbox"/>
3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara	<input type="checkbox"/>

NB: Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



Bektor I,  
  
 Dr. Bafki Alamsyah, M.T., Ph.D.

Medan, 10 Desember 2018  
 Pemohon,  
  
 (Desty Rnika)

Disahkan oleh :  
 Dengan  
  
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., Akains)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 (Pembimbing I, S.Pd., M.Hum.)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 K.a. Prodi Akuntansi  
  
 (Angei Pratama Nasution, SE., M.St.)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 (Pembimbing II, S.Pd., M.Hum.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------



Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme 54%  
Medan, 27 Agustus 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

AA/Ka. LPMU  
HUSNI M. RITONCA, BA., MSc.

Medan, 15 Agustus 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Telah di terima berkas persyaratan dapat di proses  
Medan, 27-08-2019  
Ka. BPAA  
an. *Arlied*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESTY RINIKA  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 13 September 1997  
Nama Orang Tua : ISMAWAN  
N. P. M : 1515100398  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 085644264008  
Alamat : Jl. Cemara Gg. Lampu No. 7A

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelelraan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terselip surat keterangan bebas laboratorium
- Terselip pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terselip foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terselip pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terselip surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Selanjutnya menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
5. UK 50% s taluan	Rp.	2.625.000
	<u>Rp.</u>	<u>4.725.000</u>

27/Agustus 2019  
*[Signature]*

Ukuran Toga : M

Diketahui/Diserujui oleh :  
*[Signature]*  
Dr. Surya Nipa, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya  
*[Signature]*  
DESTY RINIKA  
1515100398

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UFT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ast) - Mhs.ybs.

TANDA BEBAS PUSTAKA  
No. ... 505 / Perm / Bp / 2019  
Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan  
Medan, 15 AUG 2019  
UNPAB INDONESIA  
Sugianto, S.Sos. S.Pd.1

# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

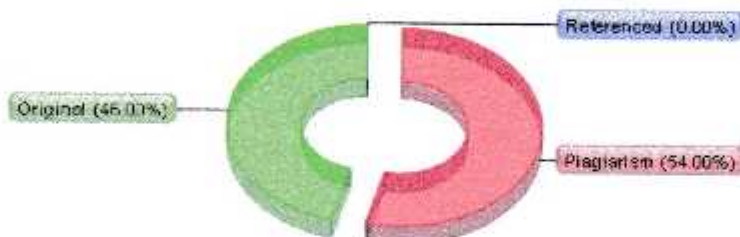
Analyzed document: 26/08/2019 15:32:32

## "DESTY RINIKA\_1515100398\_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 430	wrds: 39593	<a href="http://repository.radenintan.ac.id/5237/1/SKRIPSI%20LINDA.pdf">http://repository.radenintan.ac.id/5237/1/SKRIPSI%20LINDA.pdf</a>
% 162	wrds: 14007	<a href="https://id.123jok.com/document/eqon580y-pengaruh-kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb-d...">https://id.123jok.com/document/eqon580y-pengaruh-kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb-d...</a>
% 111	wrds: 10158	<a href="http://eprints.dinus.ac.id/8635/1/jurnal_12573.pdf">http://eprints.dinus.ac.id/8635/1/jurnal_12573.pdf</a>

[Show other Sources:]

Processed resources details:

273 - Ok / 61 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

[not detected]



[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpeb@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Rusyda Nazirah Yunus SS, M.Si  
 Nama Mahasiswa : DESTY RINIKA  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100398  
 Panjang Pendidikan : S1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh kontribusi Pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT MEDAN UTARA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/08 -2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cover</li> <li>- Daftar isi, Daftar Gambar &amp; tabel</li> <li>- Teori tentang di BAKU UUD dll</li> <li>- Latar belakang masalah, uraian dgn identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan → Hipotesis</li> <li>- Indikator masalah</li> <li>- Daftar pustaka</li> <li>- Bibliografi</li> <li>- Tampilan Data</li> <li>- Output spss</li> </ul>		

Medan, 07 Agustus 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Rusyda Nathira Yunus, S.S., M.Si  
 Nama Mahasiswa : DESTY RINIKA  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100305  
 Panjang Pendidikan : S1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Kontribusi Pajak Kendararaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendararaan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
06 / 08 / 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Substansi Bab I (latar belakang, Kewajiban, hipotesis, signifikansi)</li> <li>- Bab II. Tema Perbankan</li> <li>- Substansi Jurnal</li> <li>- Tabel sheet pembukuan</li> </ul>		
	<p>07 / 08 / 2019            Ane sidang skripsi</p>		

Medan, 07 Agustus 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si  
Dosen Pembimbing II : Rusyda Nazhira Yunus S.S., M.Si  
Nama Mahasiswa : DESTY RINIKA  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100398  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengadaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
13 Agustus	Perbaiki penulisan Gelar Penulisan Anging di mirapukan Paragraf Perbaiki , jangan terlalu panjang Setiap penulis yang ada di lupa wajib ada di Daftar pustaka		
14 Agustus	ACC Skripsi		

Medan, 08 Agustus 2019

Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan.



Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, SE, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Risydah Yunus, S.S, M.Si  
 Nama Mahasiswa : DESTY RINIKA  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100398  
 Jenjang Pendidikan : S1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi dan komitmen organisasi Terhadap Kinerja Manjerial Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25 Maret 2019	Sistematika penulisan		
15 April 2019	BAB I - Identifikasi masalah sesuai Latar belakang  BAB III - Sampel dan Metode penelitian		
28 April 2019	BAB III - Metode penelitian - Populasi dan Sampel - Daftar Pustaka - Sistematika penulisan		

Ace Seminar proposal  
  
 29/04 - 2019  
 Dp I

Medan, 18 Maret 2019  
 Diketahui/Ditetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Rusyidah Yunus, SE., M.Si  
 Nama Mahasiswa : DESTY RINIKA  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100398  
 Jenjang Pendidikan : S1  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi dan  
 Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajemen  
 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
22 April 2019	- Jarak Spasi - Judul di cover - Sistematika penulisan - Daftar pustaka	3Rmf	
19 Mei 2019	Daftar pustaka Daftar Isi Penyusunan paragraf	3Rmf	
21 Mei 2019	ACC Seminar Proposal	3Rmf	

Medan, 18 Maret 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan  
Email : [fasosa@pancabudi.ac.id](mailto:fasosa@pancabudi.ac.id) <http://www.pancabudi.ac.id>

### BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat Tanggal, 04 Bulan, Oktober ... Tahun, 2019....., telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi..... Semester Tahun Akademik ..... bagi mahasiswa/i atas nama :

1. Nama : Desty Rinika
2. Npm : 1515100398
3. Program Studi : Akuntansi
4. Tanggal Ujian : .....
5. Judul Skripsi Lama : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara
6. Judul Skripsi Baru : Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara

**Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.**

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Junawan, S.E., M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Fitri Yani Panggabean, SE, Msi	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Rusyda Nazirah Tunus, SS., Msi	
4	Anggota III/ Penguji I	Vina Arnita, SE., M.Si	
5	Anggota IV/ Penguji II	Hernawaty, SE., MM	



## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara dan sekaligus untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel 24 sampel dari tahun 2017-2018. Jenis data yang dipakai data kuantitatif dari laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Data yang telah dikumpulkan di analisis dengan metode pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara. Dan rata-rata kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 44,64% sedangkan kontribusi yang diberikan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yaitu mencapai 53,93%.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

## **ABSTRACT**

---

*The purpose of this research is to test whether motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees have a significant effect local own-source revenue at the North Medan UPT Regional Tax and Retribution Management Agency and at the same time to find out how much motor vehicle tax contribution and the cost transferring the name of a motor vehicle for the local own-source revenue. The research method used is an associative research method by selecting samples using purposive sampling with a total sample of 24 samples from 2017-2018. The type of data used is quantitative data from the realization report of motor vehicle tax revenue, cost of motorized vehicle names and local own-source revenue. The data collected was analysed using the classical assumption testing method and hypothesis testing using the t test, f tes, and the coefficient of determination test. The results of the analysis show that a portion of motor vehicle tax and motor vehicle transfer costs have a significant influence on local own-source revenues. Simultaneously motor vehicle tax and motor vehicle transfer costs have a significant influence on local own-source revenue from the North Medan UPT Regional Tax and Retribution Management Agency .And the average contribution made by the motor vehicle tax to regional original income is 44.64%, while the contribution given by motor vehicle transfer fees to the regional original income is 53.93%.*

*Keywords : motor vehicle tax, motor vehicle transfer costs and local own-source revenue*

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN1</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Pendapatan Asli Daerah .....	8
2. Pajak.....	9
3. Pajak Daerah .....	11
4. Pajak Kendaraan Bermotor .....	15
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	18
C. Kerangka Konseptual.....	20
D. Hipotesis .....	21
<b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	23
D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26
F. Teknik Analisis Data .....	26
1. Analisis Kontribusi.....	26
2. Pengujian Asumsi Klasik .....	27
3. Model Analisis Data .....	29
4. Pengujian Hipotesis.....	29



A. Hasil Penelitian.....	32
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provsu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara .....	32
2. Peranan dan Tujuan Pembentukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara.....	34
3. Wilayah Kerja .....	36
4. Logo Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara .....	38
5. Visi, Misi, Motto, Strategi, dan Komitmen Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPPRD) UPT SAMSAT Medan Utara.....	39
6. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara.....	40
7. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara.....	42
8. Deskripsi Variabel Penelitian.....	43
9. Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah .....	47
10. Uji Asumsi Klasik .....	49
11. Analisis Regresi Berganda .....	53
12. Pengujian Hipotesis.....	55
B. Pembahasan .....	58
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	 62
A. Simpulan.....	62
B. Saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
BIODATA

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Sebelumnya.....	18
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian.....	24
Tabel 3.2 Definisi Operasionalisasi.....	24
Tabel 4.1 UPTD Provinsi Sumatera Utara .....	36
Tabel 4.2 Samsat Gerai Provinsi Sumatera Utara.....	37
Tabel 4.3 Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	43
Tabel 4.4 Data Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama.....	44
Tabel 4.5 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	45
Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	47
Tabel 4.7 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	48
Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas.....	51
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda.....	53
Tabel 4.11 Uji Parsial (t).....	55
Tabel 4.12 Uji Simultan (Uji F).....	57
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	21
Gambar 4.1 Logo Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.....	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	41
Gambar 4.3 Grafik Histogram.....	49
Gambar 4.4 Grafik Normal P-P Plot.....	50
Gambar 4.5 <i>Scatterplot</i> .....	52

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan bantuan-Nya sehingga pada waktunya penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara”.

Selama dalam tahap penyelesaian skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan namun dengan keyakinan dan atas bantuan Allah SWT. Hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu dan memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Rusyda Nazirah Yunus, S.S., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pengarahan serta bimbingan kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ismawan dan Ibu S. Deliana beserta keluarga saya yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan moril dan materil.



7. Bapak H. Ibrahim Ichsan Hrp S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staff/Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam memperoleh data pelengkap untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pengajar dan pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
10. Seluruh sahabat-sahabat terdekat saya dan teman-teman seperjuangan stambuk 2015 kelas Akuntansi Siang B yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan akan penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan waktu. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Oktober 2019

Penulis

DESTY RINIKA

1515100398

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pencapaian tujuan negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Untuk itu, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terkait Pemerintah Daerah yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 terkait perimbangan keuangan daerah yang juga sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sejauh ini, aturan ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk berusaha membentuk keadilan dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan, meningkatkan pelayanan, dan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki di daerahnya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan demikian daerah perlu melakukan upaya-upaya positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu sumber PAD berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu, perolehan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan dan penyelenggaraan yang mengarah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan pemerintah daerah. Setiap daerah berhak dalam mengelola sumber daya yang dimiliki di daerahnya tersebut agar menghasilkan penerimaan bagi daerahnya yaitu dengan mengenakan pungutan berupa pajak kepada masyarakat (Mustika, 2013).

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan badan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan, pengembangan, pengendalian pajak dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bahwa pajak daerah tingkat I dibagi meenjadi 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Berdasarkan asas otonomi daerah, terdapat permasalahan tentang peningkatan upaya penerimaan daerah melalui pajak yaitu salah satunya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat sehingga minat masyarakat mengalami peningkatan untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat di masyarakat.

Perkembangan peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga dapat memicu dampak negatif yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari yaitu kemacetan. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya untuk menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor guna untuk mengurangi tingkat kemacetan. Tetapi penetapan tarif progresif ini masih belum mampu dalam menekankan angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia.

Selain itu dilihat dari data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara dimana penerimaan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 sebesar Rp 969.666.337.952,00 dari yang ditargetkan Rp 843.780.856.419,00 sedangkan ditahun 2018 meningkat sebesar Rp 1.038.395.089.767,00 dari yang ditargetkan Rp 925.217.875.766,00 kemudian pada realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di tahun 2017 sebesar Rp 2.123.656.558.451,00 dari yang ditargetkan Rp 1.881.783.185.924,00 dan naik ditahun 2018 sebesar Rp 2.379.985.912.022,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp 2.023.777.831.099,00. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara di tahun 2017-2018 sudah mencapai target yang telah ditetapkan namun tetapi kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di tahun 2017 yaitu sebesar 45,66% dan ditahun 2018 sebesar 43,63%, yang berarti menunjukkan adanya penurunan kontribusi sebesar 2,03%.

Dilihat dari persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor yang masih dibawah 50% kondisi ini menggambarkan adanya masalah pada kontribusi pajak kendaraan bermotor. Untuk itu hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor namun masih belum efektif dalam mengoptimalkan kontribusi penerimaan pajaknya.



Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB mengalami fluktuasi yang mengakibatkan kurang efektif dalam mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.
- b. Kontribusi yang diberikan oleh PKB terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun 2017-2018 dan rata-rata kontribusinya yaitu masih dibawah 50%.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, batasan masalah dalam penelitian yaitu lebih terfokus pada pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah UPT Medan Utara.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara?
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan
3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Untuk mengetahui Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .
- c. Untuk mengetahui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, mengembangkan pola pikir dan mendalami pengetahuan teoritis maupun sistematis tentang pengaruh

kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Penelitian ini dapat mengetahui upaya-upaya yang dilakukan instansi untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dan bahan pembanding dalam penelitian sebelumnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Maria Lidya Stephania Djago (2015) yang berjudul : “ Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah PERIODE 2009-2013 Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara”. Sedangkan penelitian ini berjudul : “ Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. Sampel Penelitian : Sampel penelitian sebelumnya menggunakan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan realisasi pendapatan asli daerah periode tahun 2009-2013,

sedangkan penelitian ini menggunakan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah tahun 2017-2018

2. Lokasi penelitian : lokasi penelitian sebelumnya di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Surabaya Utara, sedangkan penelitian ini di lakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.
3. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, terkait perimbangan keuangan daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

- a. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan aturan pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanaannya dipaksakan.
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang secara sah sebagai pembayaran pemakaian atas memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan dengan kata lain retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- c. Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan daerah dari keuntungan bersih daerah berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang memiliki sifat dalam suatu kesatuan produksi, menambah pendapatana daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan yang bertujuan untuk menunjang dan memantapkan kebijakan daerah disuatu bidang tertentu

Untuk itu, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dampak yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah yaitu dalam pembangunan sektor publik seperti pembangunan jalan, fasilitas umum dan lain-lain.

## **2. Pajak**

### **a. Pengertian Pajak dan Fungsinya**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang diperoleh dari pemungutan pajak untuk membiayai untuk kepentingan umum masyarakat. Menurut Resmi dalam Hayati (2016), “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu menurut ketentuan peraturan yang ditetapkan pemerintah, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk kesejahteraan umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. dalam Hayati (2015:10).“ pajak adalah iuran kepada Negara ( yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2014:3), pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :

1) Fungsi *Budgetair* ( Sumber Keuangan Negara)

Yaitu pajak sebagai sumber keuangan Negara artinya pemerintah berupaya memasukkan uang sebanya-banyaknya ke kas Negara guna untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan melalui pemungutan pajak sesuai peraturan yang telah ditetapkan seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi *Regulated* (Pengatur)

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang social dan ekonomi dalam mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, seperti pajak terhadap pejualan atas barang mewah yang dikenakan dalam transaksi jual beli barang mewah.

**b. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2014:11), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 sistem yaitu :

- 1) *Official Assessment Sytem*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajaknya yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) *With Holding System*  
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang bersangkutan oleh wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Resmi (2014), “ pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah masing-masing.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah menurut perundang-undangan guna membiayain keperluan daerah dalam pembangunan daerah dan juga kemakmuran masyarakat.

#### **b. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi 2 kelompok, yaitu :

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda di jalan darat beserta gandengannya termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor. Jadi pajak kendaraan b



ermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau sepihak yang terjadi dalam jual beli, warisan, tukar-menukar, atau pemasukan ke badan usaha yang tertera dalam perjanjian yang sudah disepakati.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yaitu berupa cairan atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud adalah semua air yang berada dipermukaan tanah, tidak termasuk air laut.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas :

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang yang ingin menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran termasuk cafe, rumah makan dan bar.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah sejenis pertunjukkan, tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda atau media yang tujuan komersialnya untuk mempromosikan, memperkenalkan dan menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan di tempat umum agar dapat dilihat, dibaca dan didengar orang.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan pembangkit tenaga listrik.

f) Pajak Mineral bukan Logam adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam maupun dipermukaan yang dapat dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun suatu usaha, termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan melalui perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas perolehan tanah atau bangunan.

j) Pajak Sarang Burung Wallet

Pajak Sarang Burung Wallet adalah pajak yang dipungut dalam setiap kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallet.

k) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha kecuali kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

#### **4. Pajak Kendaraan Bermotor**

##### **a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda di jalan darat beserta gandengannya termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berurut-turut terhitung saat mulai pendaftaran dan dibayar sekaligus dimuka (Musnal dalam Nadya, 2017).

Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang sering disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, jika wajib pajak merupakan badan usaha maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Pajak ini meningkat seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi salah satu kebutuhan dalam masyarakat sebagai penunjang aktivitasnya sehari-hari dilihat dari jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat berdampak buruk bagi daerah yaitu salah satunya adalah kemacetan.

Untuk itu, Provinsi Sumatera Utara menetapkan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengurangi tingkat kemacetan tersebut yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) yaitu tentang kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif. Tetapi tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, berikut adalah beberapa pengecualiannya, antara lain :



- 1) Kereta Api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga international yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- 4) Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti yang disegel dan disita.

**b. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Perda Sumatera Utara No 1 Tahun 2011 pasal 6 tentang Pajak Daerah terkait dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

**c. Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak kendaraan bermotor dalam Perda Sumatera Utara No 1 Tahun 2011 adalah:

- 1) 1,75% ( satu koma tujuh puluh lima) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi.
- 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah /TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- 4) 0,2% (nol koma 2 persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat alat besar.

## **5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

### **a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Perda Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke badan usaha.

Yang menjadi objeknya adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan dan penyerahan tersebut tidak termasuk dalam perjanjian sewa beli atas penguasaan kendaraan bermotor tersebut. Dan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

### **b. Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dihitung berdasarkan 2 unsur pokok, yaitu :

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor.
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

### **c. Tarif dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Perda Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 21, Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen).
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Dan khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum , tarif pajaknya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan pertama sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen)
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Besaran pokok BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditetapkan pada Perda Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 21 dengan dasar pengenaan BBN-KB.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beragam hasil penelitian yang merupakan sejenis dengan penelitian ini yaitu :

**Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Model analisis	Hasil penelitian
Maria (2015)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Periode 2009-2013	$X_1 =$ Pajak Kendaraan Bermotor $X_2 =$ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor $Y =$ Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif	Dari hasil perhitungan analisis kontribusi PKB dan BBN-KB di UPTD Surabaya Utara dapat dilihat bahwa kontribusi sekitar 40% sampai 60%. Berarti dalam penelitian ini diperoleh hasil PKB dan BBN-KB memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan PAD dari UPTD Surabaya Utara.
Anggraini, Arisman dan Yunita	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea	$X_1 =$ Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD

(2016)	Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan	$X_2 = \text{Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor}$  $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$		Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014. Sedangkan BBNKB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, tetapi secara simultan PKB dan BBN-KB berpengaruh terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014.
Wiranti (2015)	Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Medan	$X_1 = \text{Pajak Hotel}$  $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$	Analisis Kontribusi	Dari hasil analisa yang diperoleh bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD terlihat adanya kenaikan dari tahun 2011 sebesar Rp 54.668.966.646,09 pada tahun 2012 kontribusi yang diberikan sebesar Rp 64.574.093.185,86 dan tahun 2013 sebesar Rp 76.053.892.503,06. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak hotel pemerintah kota Medan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Suryani (2016)	Pengaruh sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	$X_1 = \text{Pajak Kendaraan Bermotor}$  $X_2 = \text{Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor}$  $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2013.

Meilda dan Sri (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 2010-2014)	$X_1 =$ Pajak Daerah $X_2 =$ Retribusi Daerah $Y =$ Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi berganda	Analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
-----------------------	--	--	---------------------------	--

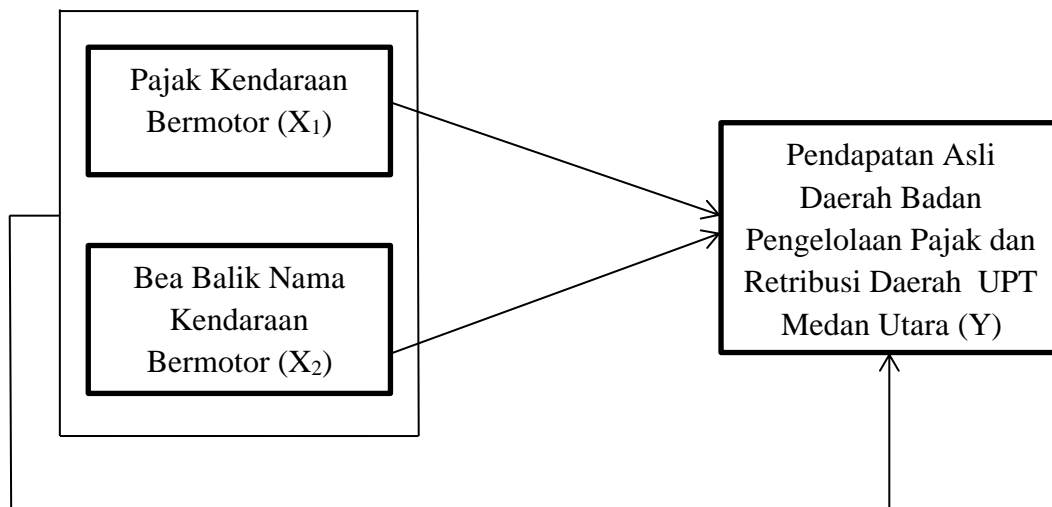
*Sumber: penulis, 2019*

### C. Kerangka Konseptual

Pemerintah daerah diberi kesempatan dalam mengembangkan, meningkatkan pelayanan, dan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki di daerahnya sendiri. Dengan demikian daerah perlu melakukan upaya-upaya positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu sumber penerimaan PAD berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan adanya pungutan pajak bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan. Untuk itu, perolehan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan dan penyelenggaraan yang mengarah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini :





**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berikut ini merupakan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak Kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.
3. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2016:37), penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variable bebas terhadap variable terikat. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai variabel independen terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No.14 Medan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai selesai.

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian**

N O	Kegiatan	Des '18	Jan '19	Feb' 19-	Mar' 19	Apr '19	Mei' 19	Juni' 19	Juli '19	Agus tus'1 9	Okt '19
1	Pengajuan judul										
2	Penyusunan proposal										
3	Bimbingan proposal										
4	Seminar proposal										
5	Pengolahan data dan penyusunan skripsi										
6	Bimbingan skripsi										
7	Sidang meja hijau										

Sumber: Penulis (2019)

### C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian di tarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2016), variabel independen (bebas) yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen (terikat), sedangkan variabel dependen (terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (independen). Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor ( $X_1$ ), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( $X_2$ ) dan 1 (satu) variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

## 2. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dan pengukuran dari variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table yang disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Definisi Operasionalisasi**

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6)	Nominal
Pajak Kendaraan Bermotor ( $X_1$ )	1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2. kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan masa pajak 12 bulan berurut-turut terhitung saat mulai pendaftaran dan dibayar sekaligus dimuka. (Musnal dalam Nadya 2017)	Nominal
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( $X_2$ )	1. Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar-menukar, warisan atau pemasukan ke badan usaha. (Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1).	Nominal

Sumber : Penulis (2019)

Penelitian ini menguji 2 variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap 1 variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah.

#### **D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016:117), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

##### **2. Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016 : 118), “ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah berdasarkan pada *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria dalam pemilihan sampel adalah laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Jumlah sampelnya sebanyak 24 sampel (2 tahun X 12).

##### **3. Jenis data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa angka dari laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini data diperoleh melalui riset data langsung di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan :

1. Pengumpulan data primer dari peraturan daerah provinsi sumatera utara tentang pajak daerah provinsi sumatera utara dan arsip data meliputi laporan realisasi penerimaan Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.
2. Data sekunder yaitu dalam hal ini peneliti membaca dan mempelajari dari jurnal, buku-buku referensi dan juga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

##### **1. Analisis Kontribusi**

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utar. Perbandingan yang digunakan adalah dengan menggunakan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk menghitung kontribusi dengan menggunakan rumus :



$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n}$$

Keterangan :

$P_n$  = Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$QX_n$  = jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor

$QY_n$  = jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

## 2. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penggunaan analisis regresi harus bebas dari asumsi-asumsi klasik seperti bebas dari asumsi normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

### a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara yang mudah untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik normal *probability plot*. Karakteristik histogram adalah bahwa pada grafik histogram pola distribusi menceng ke kanan dan membawahi hampir semua grafik batang. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya tidak jauh dari garis diagonal.

Untuk melengkapi hasil analisis grafik normal digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S). Pada uji ini dapat dilihat probabilitas signifikan terhadap variabel. Jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data itu terdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat VIF dan korelasi diantara variabel bebas. Batasan umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan  $VIF > 10$ .

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Cara yang digunakan untuk melihat masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson sebagai berikut :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti autokorelasi positif
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi.

### 3. Model Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk mendukung hasil dari penelitian ini adalah analisis regresi berganda, karena ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi ini dilakukan dengan menggunakan alat statistik melalui bantuan program SPSS, untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi daerah UPT Medan Utara
- a = Konstanta
- $b_1, b_2, b_3$  = Koefisien

$X_1$	= Pajak Kendaraan Bermotor
$X_2$	= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
$e$	= Tingkat kesalahan pengganggu

#### 4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda.

##### a. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual, uji ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel tidak bebas (dependen). Bentuk pengujiannya yaitu :

$H_0$  :  $b_1, b_2, b_3 = 0$ , yang artinya bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a$  :  $b_1, b_2, b_3 \neq 0$ , yang artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji ini memiliki kriteria pengambilan keputusan yaitu :

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak.

Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak atau  $H_0$  diterima.

**b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)**

Pengujian hipotesis ini secara simultan (keseluruhan) menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Bentuk pengujiannya yaitu :

Ho :  $b_1, b_2, b_3 = 0$ , yang artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Ha :  $b_1, b_2, b_3 \neq 0$ , yang artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji ini memiliki kriteria pengambilan keputusan yaitu :

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka Ha diterima atau Ho ditolak.

Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka Ha ditolak atau Ho diterima.

**c. Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naikturunnya variabel dependen. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai  $R^2$  semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dikatakan rendah. Apabila nilai  $R^2$  mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provsu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara**

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada awalnya mengurus pengelolaan pajak dan pendapatan daerah dibawah Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah Tingkat I Sumatera Utara. Dengan demikian, tentu bagian Pajak Pendapatan Daerah berubah menjadi Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan terbentuknya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU, maka Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah pada tanggal 1 September 1975, keluarlah surat Menteri Dalam Negeri nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pnedapatan Tingkat II, yang sebelumnya dibawah naungan Direktorat Pendapatan Daerah, yang namanya diubah menjadi Dinas Pendapatan Sumatera Utara. Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 nomor 14/II/GSU dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara.

Pembentukan Dinas Pendapatan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KUPD 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978, dibentuklah cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Utara diseluruh Kabupaten atau Kotamadya Tingkat II di Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.061/2743/S tanggal 22 November 1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, maka nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah juga menjadi Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik Kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau selanjutnya disingkat menjadi SAMSAT.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah gabungan dari 4 (empat) instansi yang mempunyai objek pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara. Keempat instansi tersebut adalah :

- a. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU.  
yang mempunyai tugas menerbitkan dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- b. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Dearah Sumatera Utara (DISPENDASU) yang mempunyai tugas memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- c. Departemen Keuangan yaitu PT.Jasa Raharja cabang utama Medan yang mempunyai tugas memungut asuransi kecelakaan.
- d. Departemen Keuangan yaitu Bank Sumut.



Pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) revolusi ini terjadi sejak Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016. Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tetap menjalankan fungsi dan tugasnya seperti Dispenda dimasa lalu, yakni menjadi penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

## **2. Peranan dan Tujuan Pembentukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara**

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan maka daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebagai konsekuensinya daerah diberikan sumber keuangan yang cukup. Untuk mengelola sumber – sumber tersebut maka dibentuklah dinas

– dinas dimana salah satunya adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang sekarang telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peranan yang sangat strategis sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara yang efektif, efisien, akuntabilitas dan transparansi. Berikut adalah peranan strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dituntut untuk :

- a. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Ketatausahaan.
- b. Mampu mewujudkan Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi.
- c. Mampu mengoptimalkan kewenangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diberikan.
- d. Mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pajak.

Tujuan pembentukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara adalah, sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Untuk meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB).
- c. Meningkatkan penerimaan asuransi kerugian kecelakaan Jasa Raharja Cabang Medan Utara.

- d. Sebagai usaha menerangkan tindakan, ketertiban, pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

### 3. Wilayah Kerja

Dalam pengembangan dan optimalisasi pelayanan yang lebih luas kepada wajib pajak , Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini membentuk 18 Cabang Daerah dan 10 Samsat Gerai berikut di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tertera di table :

**Tabel 4.1 UPTD Provinsi Sumatera Utara**

NO	UNIT	WILAYAH KERJA
1	UPTD Medan Utara	Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Labuhan, Medan Belawan.
2	UPTD Medan Selatan	Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Kota, Medan Amplas, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Pancur Batu.
3	UPTD Binjai	Kota Binjai dan Kabupaten.
4	UPTD Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Balai
5	UPTD Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi.
6	UPTD Lubuk Pakam	Lubuk Pakam.
7	UPTD Stabat	Stabat.
8	UPTD Tanjung Balai	Tanjung Balai.
9	UPTD Penyabungan	Kabupaten Mandailing Natal.
10	UPTD Kisaran	Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tanjung Balai.

11	UPTD Rantau Prapat	Kabupaten Labuhan Batu.
12	UPTD Kabanjahe	Kabupaten Karo.
13	UPTD Sibolga	Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah.
14	UPTD Sidikalang	Kabupaten Dairi.
15	UPTD Padang Sidempuan	Kabupaten Tapanuli Selatan.
16	UPTD Gunung Sitoli	Kabupaten Nias.
17	UPTD Balige	Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir.
18	UPTD Tarutung	Tarutung.

Sumber : UPT Medan Utara

**Tabel 4.2 Samsat Gerai Provinsi Sumatera Utara**

NO	UNIT	WILAYAH KERJA
1	Samsat Gerai	Marelan.
2	Samsat Gerai	Indra Pura.
3	Samsat Gerai	Perbaungan.
4	Samsat Gerai	Kampung Pajak.
5	Samsat Gerai	Hutabalang.
6	Samsat Gerai	Tanjung Morawa.
7	Samsat Gerai	Tembung.
8	Samsat Gerai	Deli Tua.
9	Samsat Gerai	Sun Plaza.
10	Samsat Gerai	Plaza Medan Fair.

Sumber : UPT Medan Utara

#### 4. Logo Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara



**Gambar 4.1 Logo Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

Arti Logo Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

1. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya melambangkan kelembutan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme atau kolonialisme, fidealisme dan komunisme.
2. Batang bersudut lima, perisa dan rantai melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan pancasila.
3. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, pohon tembakau, ikan, daun padi, dan tulisan “SUMATERA UTARA” melambangkan yang indah permai mansyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah – limpah.
4. Tujuh belas kuntum kapas , depalan sudut sarang laba – laba dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiga – tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan

tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pecinta, keadaan dan pembela keadilan.

5. Bukit barisan yang berpuncak lima melambangkan kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan kegotong – royongan yang dinamis.

## **5. Visi, Misi, Motto, Strategi, dan Komitmen Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPPRD) UPT SAMSAT Medan Utara**

### a. Visi BPPRD UPT SAMSAT Medan Utara

” Terwujudnya Pelayanan yang Berorientasi Good Governance dan Berbasis Teknologi .”

### b. Misi BPPRD UPT SAMSAT Medan Utara

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan keamanan registasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana untuk terwujudnya pelayanan kualitas.

### c. Motto BPPRD UPT SAMSAT Medan Utara

“ Profesional kerjaku, dan Kepuasan Masyarakat Tujuanku.”

### d. Strategi BPPRD UPT SAMSAT Medan Utara

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
  - a) Menyederhanakan system dan prosedur
  - b) Menerapkan pelayanan prima secara konsisten

- c) Sosialisasi yang berkesinambungan
  - d) Menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat
- 2) Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor :
- a) Meningkatkan pelayanan pengarsipan dan keamanan data kendaraan bermotor.
  - b) Meningkatkan teknologi dalam pengarsipan data kendaraan bermotor.
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan anggaran:
- a) Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien.
  - b) Tertib pemungutan, tertib pembukuan dan tertib laporan.
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia:
- a) Meningkatkan disiplin dan etos kerja.
  - b) Meningkatkan kompetensi.
  - c) Meningkatkan kesejahteraan.
- e. Komitmen BPPRD UPT SAMSAT Medan Utara
- 1) Secara terus menerus memperbaiki dan mengembangkan system manajemen mutu.
  - 2) Kepuasan masyarakat merupakan tujuan pelayanan.

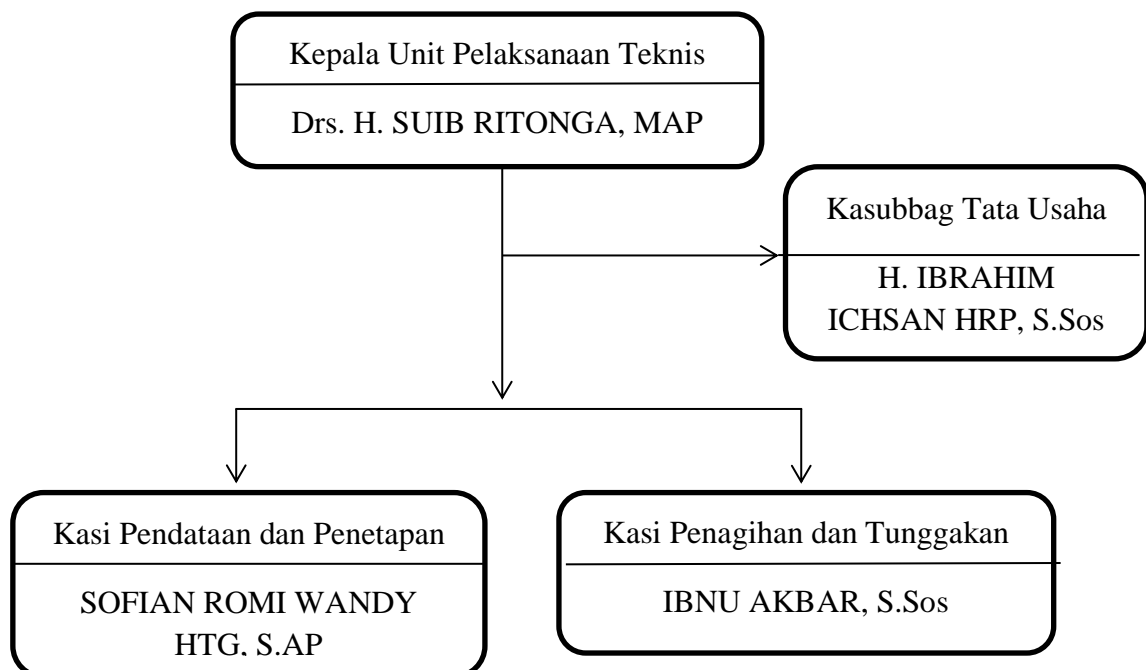
## **6. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antar individu – individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan



dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis – garis besar hubungan antara fungsi – fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas dapat diartikan bahwa struktur organisasi ini tergantung pada tugas – tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu – individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

UPT Medan Utara dipimpin oleh seorang Kepala UPT, dibantu Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. UPT Medan Utara terdiri dari 5 bagian, yaitu Seksi Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Seksi Pendapatan lain – lain (PPL), Seksi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air Bea Balik Nama Angkutan di Atas Air (PA3/BBNA3).



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi**

**7. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT SAMSAT Medan Utara**

a. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis

Tugas dan Fungsi :

- 1) Melaksanakan koordinasi kerja sama dengan pihak terikat, pembinaan pengendalian dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- 2) Pelaksanaan tugas lain di berikan oleh kepala dinas dan wakil kepala dinas sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- 3) Menyempurnakan konsep dan pendapatan potensi dari masing – masing seksi.

b. Kepala Subtansi Bagian Tata Usaha

Tugas dan Fungsi :

- 1) Menyimpan surat – surat yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan surat – surat dari seksi lainnya yang telah selesai di proses.
- 2) Mencatat dalam pembukuan pemasukan yang telah ditentukan inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK).

c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor / Kasi Pendataan dan Penetapan

Tugas dan Fungsi :

- 1) Menghubungi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan surat.
- 2) Membuat laporan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

- 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis sesuai bidangnya.

d. Seksi Retribusi / Kasi Penagihan dan Tunggakan

Tugas dan Fungsi :

- 1) Menyempurnakan dan menyusun konsep standard teknis retribusi bagi hasil pajak dan bukan serta pembukuan dan pelaporannya.
- 2) Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data / bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan jenis retribusi, teknis pemungutan dan tata administrasi retribusi, sosialisasi standard yang ditetapkan serta penetapan target retribusi.
- 3) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) sesuai dengan bidang teknisnya.

## 8. Deskripsi Variabel Penelitian

**Tabel 4.3 Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Dalam Rupiah)**

NO	Bulan	Tahun	
		2017	2018
1	Januari	74.354.084.871,00	81.017.748.054,00
2	Februari	70.364.368.841,00	77.291.146.868,00
3	Maret	84.034.545.062,00	89.887.493.120,00
4	April	74.333.014.774,00	93.983.822.610,00
5	Mei	76.076.802.613,00	90.252.893.671,00
6	Juni	60.819.054.788,00	56.814.815.933,00
7	Juli	80.963.189.462,00	95.490.049.350,00

8	Agustus	84.782.628.280,00	95.366.405.517,00
9	September	76.351.858.250,00	86.432.659.411,00
10	Oktober	82.409.885.223,00	74.783.890.907,00
11	November	84.343.471.953,00	70.684.419.789,00
12	Desember	120.833.433.835,00	126.389.744.540,00
	Total	969.666.337.952,00	1.038.395.089.767,00

Sumber : BPPRD UPT Medan Utara

Berdasarkan tabel 4.3 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi di tahun 2017 adalah pada bulan Desember sebesar Rp 120.833.433.835,00 sedangkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) terendah terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar Rp 60.819.054.788,00. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang mencapai penerimaan tertinggi yaitu di bulan desember sebesar Rp 126.389.744.540,00 dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terendah terjadi dibulan Juni sebesar 56.814.815.933,00.

**Tabel 4.4 Data Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (Dalam rupiah)**

NO	Bulan	Tahun	
		2017	2018
1	Januari	65.831.640.487,00	93.122.310.221,00
2	Februari	75.563.601.237,00	113.685.056.175,00
3	Maret	109.983.540.497,00	129.738.697.736,00
4	April	82.401.688.191,00	993.356.155.288,00
5	Mei	90.934.283.607,00	88.343.182.344,00

6	Juni	60.319.542.725,00	54.230.891.445,00
7	Juli	94.677.419.465,00	143.313.694.022,00
8	Agustus	124.299.106.458,00	161.430.370.525,00
9	September	103.121.488.259,00	125.412.771.411,00
10	Oktober	106.458.232.687,00	131.800.347.532,00
11	November	113.213.425.986,00	99.890.721.629,00
12	Desember	90.956.448.256,00	80.533.584.427,00
	Total	1.117.760.457.858,00	1.314.857.782.755,00

Sumber : BPPRD UPT Medan Utara

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tertinggi ditahun 2017 terjadi di bulan Agustus yaitu sebesar Rp 124.299.106.458,00 sedangkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terendah terjadi dibulan Juni yaitu sebesar Rp 60.319.542.725,00. Di tahun 2018, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tertinggi terjadi di bulan Agustus sebesar Rp 143.313.694.022,00 sedangkan penerimaan terendah terjadi di bulan Juni Rp 54.230.891.445,00.

**Tabel 4.5 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  
(Dalam Rupiah)**

NO	Bulan	Tahun	
		2017	2018
1	Januari	143.301.957.785,00	176.873.397.613,00
2	Februari	148.833.439.479,00	193.708.767.014,00

3	Maret	197.230.152.545,00	222.236.840.484,00
4	April	159.551.369.513,00	188.168.354.572,00
5	Mei	170.029.803.650,00	180.116.321.599,00
6	Juni	123.671.361.335,00	112.627.898.355,00
7	Juli	178.713.943.539,00	241.911.090.272,00
8	Agustus	212.555.168.702,00	259.778.230.341,00
9	September	182.845.131.264,00	214.969.449.983,00
10	Oktober	192.253.697.860,00	209.136.038.665,00
11	November	201.280.601.338,00	172.940.841.287,00
12	Desember	213.389.931.441,00	207.398.681.839,00
	Total	2.123.656.558.451,00	2.379.985.912.022,00

Sumber : BPPRD UPT Medan Utara

Dilihat berdasarkan tabel 4.5 diatas, data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di tahun 2017 terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar Rp 213.389.931.431,00 sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah terjadi dibulan Juni sebesar Rp 123.671.361.335,00. Di tahun 2018, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp 259.778.230.341,00 sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar Rp 112.627.898.355,00.

## 9. Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara. Kontribusi ini dilihat dengan membandingkan dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2017-2018, apakah kontribusi yang diberikan mengalami fluktuasi yaitu makin meningkat, makin menurun atau bahkan tidak stabil setiap bulannya. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber keuangan untuk memenuhi pembiayaan dan pembangunan didaerahnya melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah :

**Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor	Jumlah penerimaan Pendapatan asli daerah	Kontribusi (%)
2017	969.666.337.952,00	2.123.656.558.451,00	45,66
2018	1.038.395.089.767,00	2.379.985.912.022,00	43,63

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami ketidak stabilan penerimaan pada setiap bulannya dan kontribusi di tahun 2017



sebesar 45,66 % sedangkan kontribusi di tahun 2018 sebesar 43,63%. Hal ini berarti kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 2,03% dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,64 % dan masih dibawah 50% . .

**Tabel 4.7 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah**

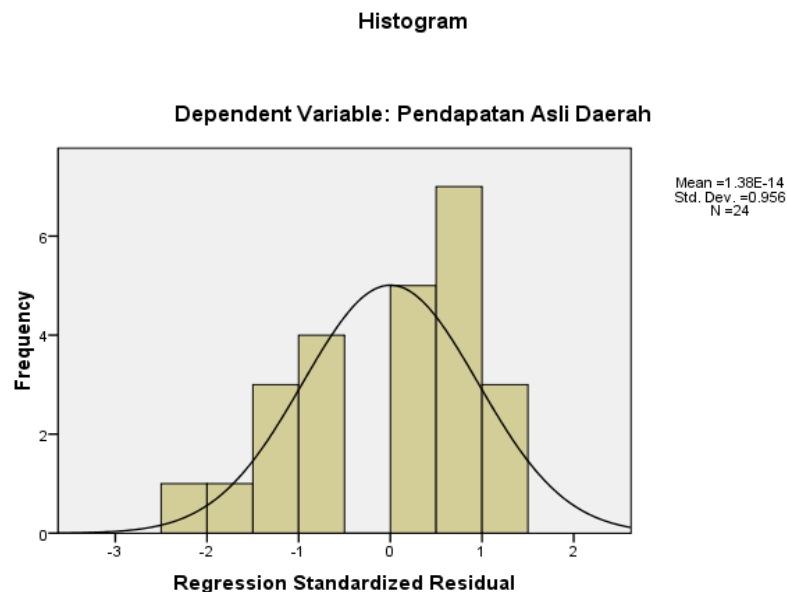
Tahun	Jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor	Jumlah penerimaan Pendapatan asli daerah	Kontribusi (%)
2017	1.117.760.457,00	2.123.656.558.451,00	52,63
2018	1.314.857.782.755,00	2.379.985.912.022,00	55,24

Berdasarkan tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami ketidak kestabilan setiap bulannya di tahun 2017-2018. Di tahun 2017 kontribusi yang diberikan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 52,63% sedangkan ditahun 2018 kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 55,24%. Hal tersebut berarti kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan ditahun 2017-2018 yaitu sebesar 2,61% dengan rata-rata kontribusi mencapai 53,93% yang dapat dikatakan bahwa kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah sangat baik.

## 10. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat dengan grafik histogram dan normal *probability plot* yang diolah dengan SPSS, berikut adalah hasil uji normalitas :

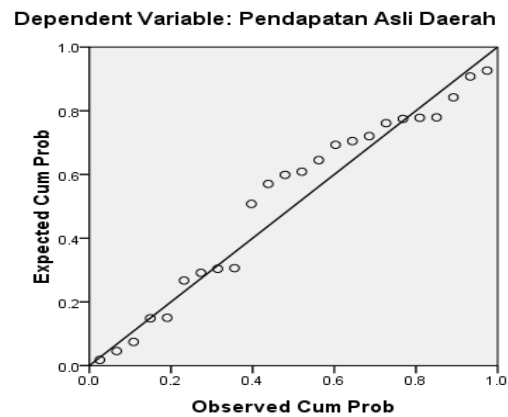


**Gambar 4.3 Grafik Histogram**

*Sumber : Hasil pengolahan SPSS Versi 16.0*

Hasil uji normalitas diatas dapat dilihat dari grafik histogram tersebut memberikan distribusi dengan membentuk lonceng yang tidak menceng (swekness) kiri maupun kanan. Dengan demikian dapat disimpulkann bahwa data tersebut adalah normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

**Gambar 4.4 Grafik Normal P-P Plot**

*Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0*

Berdasarkan pada gambar 4. dapat dikatakan bahwa hasil uji tersebut menggunakan grafik normal plot yaitu dapat dilihat dari titik-titik yang menyebar mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam uji ini terdistribusi secara normal.

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel independen satu dengan variabel independen lain. Pengujian ini dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika tolerance value  $< 0,1$  atau VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolonieritas

Jika tolerance value  $> 0,1$  atau VIF  $> 10$  maka terjadi multikolonieritas.

**Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

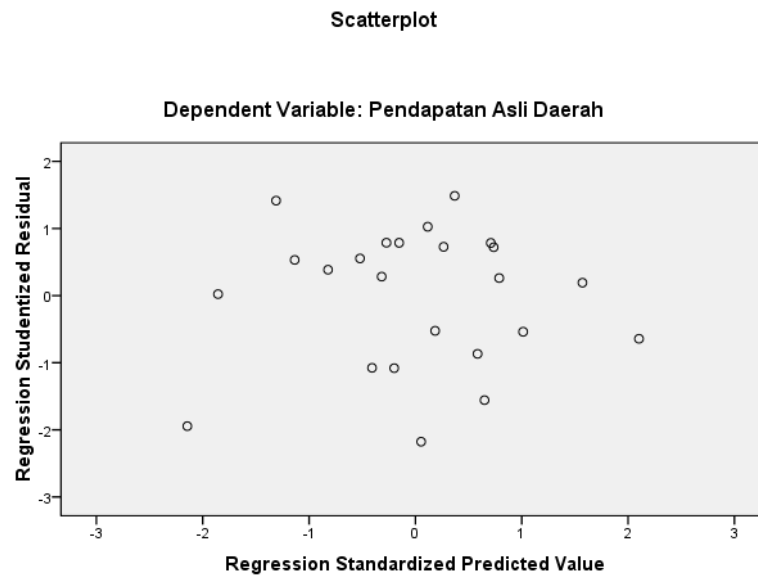
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.503E9	7.735E8		4.529	.000		
	Pajak Kendaraan Bermotor	.968	.009	.441	110.806	.000	.909	1.100
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.018	.005	.774	194.255	.000	.909	1.100

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolonearitas dalam penelitian ini nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 1,100 < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 0,909 > 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolonearitas pada regresi ini.

### c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedasitas bertujuan untuk menguji terjadinya varian residual dari pengamatan satu kepengamatan lain. Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan SPSS :



**Gambar 4.5 Scatterplot**

*Sumber : hasil pengolahan SPSS Versi 16.0*

Berdasarkan gambar 4.5 dapat dilihat bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian ini terbebas dari masalah heteroskedastitas.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu ( $t$ ) dengan variabel pengganggu periode sebelumnya ( $t-1$ ). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Berikut adalah hasil uji Autokorelasi dapat dilihat dari tabel ini :

**Tabel 4.9 Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.920 <sup>a</sup>	.876	.864	6.281E8	.728

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui hasil dari nilai D-W sebesar +0,728 yaitu  $(-2 < 0,728 < +2)$ , karena nilai D-W diantara -2 sampai +2 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

## 11. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut :  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

**Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.503E9	7.735E8		4.529	.000		
	Pajak Kendaraan Bermotor	.968	.009	.441	110.806	.000	.909	1.100
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.018	.005	.774	194.255	.000	.909	1.100

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.503E9	7.735E8		4.529	.000		
	Pajak Kendaraan Bermotor	.968	.009	.441	110.806	.000	.909	1.100
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.018	.005	.774	194.255	.000	.909	1.100

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,503 + 0,968X_1 + 1,018X_2$$

Berikut adalah penjabaran dari persamaan diatas yaitu :

1.  $a = 3,503$

nilai ini merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada perubahan dari variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor , maka pendapatan asli daerah (Y) sebesar 3,503 jika variabel-variabel lain dianggap nol.

2.  $b_1 = 0,968$

koefisien ini menunjukkan bahwa jika variabel pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 1, maka pendapatan asli daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,968.

3.  $b_2 = 1,018$

koefisien ini menunjukkan bahwa jika variabel bea balik nama kendaraan bermotor meningkat sebesar 1, maka pendapatan asli daerah (Y0) akan meningkat sebesar 1,018.

## 12. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individu dengan menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, jika nilai signifikansi  $< 0,05$  artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.11 Uji Parsial (t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.503E9	7.735E8		4.529	.000		
	Pajak Kendaraan Bermotor	.968	.009	.441	110.806	.000	.909	1.100
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.018	.005	.774	194.255	.000	.909	1.100

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah



Berdasarkan tabel 4.10 terdapat hasil uji t, berikut adalah penjelasannya :

- 1) Pengujian hipotesis pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Pengujian ini menggunakan ketentuan :

Ha diterima dan  $H_0$  ditolak, apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$

Ha ditolak dan  $H_0$  diterima, apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$t_{hitung}$  sebesar 110,806 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,0796 dan signifikan sebesar 0,000 sehingga  $t_{hitung} 110,806 > t_{tabel} 2,0796$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka Ha diterima dan  $H_0$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.

- 2) Pengujian hipotesis pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Pengujian ini menggunakan ketentuan :

Ha diterima dan  $H_0$  ditolak, apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$

Ha ditolak dan  $H_0$  diterima, apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$t_{hitung}$  sebesar 110,806 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,0796 dan signifikan sebesar 0,000 sehingga  $t_{hitung} 110,806 > t_{tabel} 2,0796$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka Ha diterima dan  $H_0$  ditolak.

#### **b. Uji Signifikan Simultan ( Uji F)**

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap variabel

terikat yaitu pendapatan asli daerah secara serempak. Untuk melihat hasil uji F yaitu dengan cara melihat ketentuan sebagai berikut :

Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

**Tabel 4.12 Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.734E22	2	1.367E22	3.465E4	.000 <sup>a</sup>
	Residual	8.284E18	21	3.945E17		
	Total	2.735E22	23			

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 3,465 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,44 maka dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} 3,465 > F_{tabel} 3,44$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan demikian regresi dalam penelitian ini pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah sehingga hipotesisnya adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

### c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.13 Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.920 <sup>a</sup>	.876	.864	6.281E8	.728

a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.11 dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,864 atau koefisien determinasinya berarti 86,4 % pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor . Sedangkan sisanya adalah 13,6% ( $100\% - 86,4\% = 13,6\%$ ) hal ini dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh dari faktor lain diluar variabel model yaitu pajak kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan sebagainya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.**

Dilihat dari tabel 4.3 data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan tertinggi yaitu di bulan Desember. Hal ini bisa terjadi karena Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara 2 tahun terakhir ini mengadakan keringanan denda atau biasa yang disebut dengan pemutihan pajak yang diadakan disetiap akhir tahun. Karena banyaknya objek pajak yang melunasi pajak kendaraan bermotor tanpa harus membayar dendanya maka itu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dibulan desember sangat meningkat dibanding bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi secara statistic dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa secara parsial variabel pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak kendaraan bermotor ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung} 110,806 > t_{tabel}$  sebesar 2,0796. Dan koefisien  $b_1$  sebesar 0,968 dengan tanda positif yang menyatakan bahwa setiap penambahan atau pengurangan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian sejalan dengan Suryani Isma Hayati (2016) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa secara parsial pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kemudian kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor tahun 2017-2018 yang diperoleh dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 2,03% dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,64%. Hal tersebut dapat terjadi karena penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi.

## **2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.**

Pada tabel 4.10 bahwa variabel bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu bea balik nama kendaraan bermotor ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sedangkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 110,806  $> t_{tabel}$  sebesar 2,0796. Dan koefisien  $b_2$  sebesar 1,018 dengan tanda positif yang menyatakan bahwa setiap penambahan atau

pengurangan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Anggraini, Arisman dan Yunita (2016) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kemudian kontribusi yang diberikan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 2,61% dari 2017-2018 dengan rata-rata kontribusi 53,93%.

### **3. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.**

Pengaruh secara simultan merupakan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Dari penelitian ini, hubungan secara simultan (Uji f) pada tabel 4.12 antara variabel pajak kendaraan bermotor ( $X_1$ ) dan bea balik nama kendaraan bermotor ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang menunjukkan  $0,000 < 0,05$  sedangkan nilai  $F_{hitung} 3,465 > F_{tabel} 3,44$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan penelitian ini sejalan dengan Suryani Isma Hayati (2016) dan Anggraini, Arisman dan Yunita (2016).

Selanjutnya dari uji koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R square yaitu sebesar 0,864 yang berarti 86,4% variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya 13,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa :

1. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak kendaraan bermotor dan variabel bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara.
2. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel pajak kendaraan bermotor dan variabel bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara secara bersama-sama atau serempak.

#### **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan, antara lain :

1. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara diharapkan dapat mempertahankan dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan dapat mengatasi tunggakan wajib pajak yang belum membayar pajak dengan cara memberikan surat teguran kepada wajib pajak/pemilik kendaraan untuk segera melunasi kewajibannya, karena penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotor mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah .

2. Bagi penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan membuat data dengan periode yang lebih lengkap atau dengan menambah variabel independen khususnya yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arista, Wiranti. 2015. *Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Medan*. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Djago, Maria Lidya Stephanie. 2015. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah periode 2009-2013 (studi kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur UPTD Surabaya Utara)*. Jurnal. Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya.
- Ellysa, Meilda dan Sri Rahayu. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Perode Anggaran Tahun 2010-2014)*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Telkom, Bandung.
- Hayati, Suryani Isma . 2016. *Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Margaretha, Anton Risman, Christina Yunita. 2016. *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data, Palembang.
- Maisyarah, R. (2018). Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mustika, Sari Tri. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Nadya, Putu dan Gayatri. 2017. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali.
- Pane, D. N. (2018). Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Pembelian Teh Botol Sosro (Studi Kasus Konsumen Alfamart Cabang Ayahanda). *Jumant*, 9(1), 13-25.

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Pramono, C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *Jumant*, 8(2), 68-78.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet
- Setiawan, A. (2018). Pengaruh Promosi Jabatan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Pegawai Di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 191-203.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.

Waruwu, A. A. (2018). Pengaruh Kepemimpinan, Stres Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *JUMANT*, 10(2), 1-14.